

2.1. Kopra	19
2.2. Jaringan Perdagangan Kopra Makassar	25
2.3. Kopra Makassar di Masa Kejayaan	29
2.4. Kopra di Masa Depresi Ekonomi	31
BAB III : PEMBENTUKAN COPRAFONDS DAN PERUBAHAN	
KEPADA MASYARAKAT PENGEKSPOR KOPRA.....	34
3.1. Sejarah dibentuknya Coprafonds	34
3.2. Coprafonds Sebagai Sumber Pendapatan Ekonomi	39
3.3. Coprafonds dipindahkan ke Jakarta	43
BAB IV: COPRAFONDS DINASIONALISASI	
KE YAYASAN KOPRA	48
4.1 Nasionalisasi Coprafonds ke Yayasan Kopra	48
4.2. Keuangan Yayasan Kopra	55
4.3 Politik Perkopraan	57
4.4 Pembubaran Yayasan Kopra	71
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84

ABSTRAK

MUDRIKA (F81115003), dengan judul “Dari Coprafonds ke Yayasan kopra 1940-1955 : Sejarah Ekonomi Politik di Makassar”, dibimbing oleh Dr. Nahdia Nur, M.Hum. dan Nasihin , S.S.,M.A.

Penelitian ini membahas tentang Coprafonds dan Yayasan Kopra yang merupakan perusahaan dagang yang memonopoli tata niaga perdagangan Kopra . Kopra merupakan komoditas penting dalam dunia perdagangan yang memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi. Setelah Indonesia merdeka terjadi perebutan monopoli tata niaga kopra baik melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun militer. Hal ini menyebabkan tata niaga kopra semakin tidak terkendali. Ekspor kopra yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi berubah menjadi masalah politik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi historis tata niaga kopra di tahun 1940-1955.

Metode penelitian dalam skripsi ini terdiri atas beberapa tahapan penting yang diawali dengan pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber) , verifikasi (kritik sumber atau kredibilitas) ,interpretasi(analisis dan sintesis), dan historiografi (penulisan sejarah) . adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu arsip Pribadi M. Saleh Lahade , arsip pribadi Rahma Tamma , arsip rahasia Propinsi Sulawesi (1946-1960).

Kata kunci : Coprafonds, Ekonomi , Politik, Yayasan Kopra

ABSTRACT

MUDRIKA (F81115003), with the title “From Coprafonds to Copra Foundation 1940-1957: The History of Political Economy in Makassar”, was guided by Dr. Nahdia Nur, M. Hum. and Nasihin, S.S., M.A.

This study discusses Coprafonds and the Copra Foundation, which are trading companies that monopolize the copra trade system. Copra is an important commodity in the world of trade which has social, cultural and economic roles. After Indonesia's independence, there was a struggle for the monopoly of the copra trade system through the central government, regional governments and the military. This causes the copra trade system to be increasingly out of control. Copra exports which were expected to contribute to the economy turned into a political problem. This study aims to describe the historical conditions of the copra trading system in 1940-1955.

the research method in this thesis consists of several important stages, starting with topic selection, heuristics (source collection), verification (source criticism or credibility), interpretation (analysis and synthesis), and historiography (historical writing). The premier sources used in this research are the personal archives of M. Saleh Lahade, the personal archives of Rahma Tamma, the secret archives of Sulawesi Province (1946-1960).

Keywords: Coprafonds, Economics, Politics, Kopra Foundation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Fase pertama abad ke-20 Pemerintah Hindia Belanda telah berhasil menciptakan tanaman kelapa yang menghasilkan kopra sebagai komoditas unggulan pada perdagangan Makassar di pasaran dunia. Tanaman kelapa yang menghasilkan kopra ini telah menjadi komoditi penting di Indonesia bagian Timur khususnya Sulawesi Selatan, salah satu hasil olahan kopra adalah minyak kelapa, yang banyak di usahakan oleh masyarakat penduduk Indonesia Timur. Kopra merupakan produk kelapa yang sangat penting karena kopra menjadi bahan baku pembuatan minyak kelapa. Kopra menjadi komoditi dagang yang utama sejak tahun 1880-an , yaitu ketika bangsa-bangsa Eropa menggunakan kopra dalam pembuatan sabun dan mentega. Dari jumlah ekspor kopra Indonesia Timur, 60 % pendapatan daerahnya tergantung dari kopra.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah pengekspor kopra utama Indonesia,. Volume ekspor yang menjadi urutan pertama itu bukan saja karena banyak pohon kelapa yang tumbuh di wilayah itu, tetapi daerah itu merupakan pelabuhan transit dari berbagai daerah produsen kopra, antara lain mando¹

Krisis ekonomi pada tahun 1929 sampai 1940 telah membawa dampak bagi

¹ A. Rasyid Asba, *“Integrasi Ekspor Kopra Makassar Di Antara Kontinuitas Dan Diskontinuitas : Makkara, Soial Humaniora*, volume 10 desember 2006: hlm. 61.

perdagangan kopra dan menyebabkan harga kopra merosot di pasaran dunia . Hal ini mengakibatkan sejumlah petani menggadaikan kebun-kebun kelapanya dan banyak eksportir Eropa Makassar mengeluh bahkan menutup usahanya, termasuk perusahaan produksi kopra Makassar (Produce Company) milik Denmark yang merupakan eksportir terkuat sejak tahun 1920-an, tidak mampu melanjutkan usahanya. Kemudian ekspor kopra dari Makassar ke Jerman pada tahun 1935 menjadi menurun².

Jatuhnya harga kopra menarik pemerintah Hindia Belanda kembali memperbaiki tata niaga kopra dengan dibentuknya Coprafonds oleh pemerintah pada tanggal 13 September 1940. Lembaga tersebut bertujuan mengatur pembelian, penggudangan, dan penjualan kopra, sehingga harga kopra yang semakin merosot di pasaran akibat depresi ekonomi dapat ditanggulangi³ Melalui cara itu pemerintah berharap agar kopra tetap eksis menjadi kekuatan ekonomi seperti halnya pada tahun 1920-an. Berbagai langkah dilakukan, antara lain adalah menurunkan biaya pengangkutan dan membangun gudang-gudang penampungan kopra. keterlibatan pemerintah secara langsung dalam tata-niaga kopra mengundang keresahan dari berbagai perusahaan dagang di Makassar, karena keterlibatan pemerintah tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Keterlibatan

²Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Arip Pribadi, Arsip Pribadi M Saleh Lahade, *Laporan mengenai laporan mengenai politik pemerintah dan social ekonomi di daerah Sulawesi selatan tahun 1950*, Nomor Registrasi 94.

³ A. Rasyid Asba :”kopra makassar perebutan pusat dan daerah :kajian sejarah ekonomi politik regional di Indonesia : (Jakarta;Yayasan OborIndonesia, 2007) ,hlm 190.

langsung pemerintah mengatur perdagangan kopra adalah cara yang tidak bisa dihindari pada masa krisis. Kebijakan pemerintah tersebut bukanlah bertujuan menghalangi pasar bebas, tetapi menyelamatkan komoditi kopra yang harganya merosot tajam.

November 1940 muncul protes dari petani kelapa akibat terbentuknya Coprafonds. Para petani tidak menerima kebijakan tersebut karena dapat mematikan kebebasan pasar. Hal itu didukung oleh anggota Volksraad melalui Mosi tak percaya kepada pemerintah, dengan alasan Coprafonds dapat dianggap memonopoli pembelian kopra yang pada akhirnya juga turut merugikan petani kelapa. Mosi itu terdiri atas Muh. Yamin, Mogot Soekawati dan Muchtar Tadjuddin Noer⁴.

Pada tahun 1946 Corprafonds mulai ditata ulang kembali, sejumlah manager dikirim ke daerah-daerah untuk menyelidiki situasi kopra di Indonesia Timur⁵. Mulailah dibenahi daerah-daerah produsen seperti perbaikan sarana komunikasi, penyediaan telegram, dan sarana pengangkutan yang memadai juga dibentuk tim pemantau kopra dengan tujuan menyelusuri pantai Sulawesi untuk memberikan penyuluhan kepada para pedagang perantara dan petani kelapa agar kopra kembali tetap dibangkitkan sebagai komoditi ekspor. Ketika ekspor kopra mulai diatur secara

⁴ *Ibid.*, hlm. 190

⁵ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Arip Pribadi, Arsip Pribadi M Saleh Lahade, *Berkas mengenai kegiatan perdagangan kelapa/kopra di Daerah Territerium Indonesia Timur antara lain : Kegiatan Yayasan Kopra Tahun 1950*, Nomor Registrasi 272.

langsung oleh pemerintah, dengan dibentuknya Coprafounds Pendudukan militer jepang membuat Coprafonds tidak berjalan dan mengalami kemacetan akibat sulitnya pengangkutan dan penekanan penduduk⁶. Namun ini hanya berjalan 2 tahun hingga Coprafonds ditata ulang kembali dengan sejumlah masalah dalam pengolaan kopra. Persoalan utama adalah kurang bergairahnya petani kelapa mengolah kopra, pedagang perantara mengalami kesulitan dalam pengumpulan kopra dan harga pembelian kopra ditentukan oleh Coprafonds, Sehingga dalam permasalahan ini Coprafonds yang dibentuk pada masa Kolonial Belanda mengalami program nasionalisasi ke Yayasan Kopra.

Pada tanggal 29 desember 1954 Coprafonds resmi dinasionalisasi menjadi Yayasan Kopra dan berpusat di Jakarta⁷. Nasionalisasi ini diharapkan kembali memperbaiki tata niaga kopra yang gagal diperbaiki oleh Coprafonds. Pemustan tata niaga kopra yang dikendalikan oleh Yayasan Kopra mengalami banyak persoalan bagi daerah produsen kopra, yang menyebabkan kembali wilayah-wilayah penghasil kopra mulai kehilangan haknya dalam menentukan tata niaga kopra, dan mengalami ketidakadilan bagi masyarakat.

Kebijakan Yayasan Kopra mendapat protes dari petani kelapa dan pedagang kopra diberbagai daerah karena tidak ada solusi bagi petani dan produsen kopra,

⁶ A.Rasyid Asba, *op cit.* ,hlm. 190

⁷ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Arip Rahasia Propinsi Sulawesi (1946-1960), *gubernur sulawesi surat masuk/ keluar tahun 1953-1957 tentang masalah yang berhubungan dengan yayasan kopra*, Nomor Registrasi 627.

sehingga para produsen di berbagai daerah akhirnya membentuk Yayasan Kelapa yang otonom sebagai bentuk persaingan kepada Yayasan Kopra yang dikelola Pemertintah Pusat⁸. Sejak terpusatnya lembaga Yayasan Kopra yang dipusatkan di Jakarta, mengakibatkan daerah-daerah produsen kopra kehilangan haknya dalam menentukan tata niaga. Mereka menggap bahwa keuntungan ekspor kopra dari daerah produsen seharusnya diberikan untuk membangun daerah mereka dan bukan dinikmati oleh daerah-daerah yang bukan produsen kopra atau membiayai proyek-proyek besar di Jakarta. Kericuhan tata-niaga kopra antara pemerintah pusat Jakarta dengan kelompok-kelompok regional di Indonesia Timur saat itu menyebabkan daerah penghasil kopra secara terang-terangan. Mengekspor kopra dengan menyelundup dan sistem barter tanpa diketahui Pemerintah Pusat.

Ketua Panitia Pemandahan Coprafonds L.C.L. Lasut menjelaskan bahwa pemandahan itu sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi negara yang morat-marit akibat perang⁹. Di samping itu pemandahan tersebut juga bertujuan menegakkan kekuasaan pemerintah pusat di bidang ekonomi, yaitu dengan mengurangi peran orang-orang Belanda dalam penguasaan Coprafonds. Dalam penjelasan itu diketahui bahwa Parlemen NIT tidak mendukung pemandahan Coprafonds ke Jakarta, bahkan Tim Panitia yang telah dibentuk oleh pemerintah

⁸ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Arsip Statis H.A Rahman Tamma, *Surat menyurat yang berhubungan dengan Yayasan Kopra Daerah Sulawesi Selatan. tahun 1955* Nomor Registrasi 116

⁹ *Ibid*,

Pusat Jakarta dianggap tidak mampu mengatasi perbedaan-bedaan yang muncul di kedua belah pihak. Untuk menjembatangi perbedaan itu maka Tan Tek Heng yang mewakili Menteri Urusan Ekonomi mengharapkan agar perbedaan antara Pemerintah federal NIT dengan Pemerintah RI dapat dipecahkan.

Persoalan tata niaga kopra semakin rumit setelah masuknya militer ke dalam bisnis tata niaga kopra. sejumlah komandan militer di daerah melakukan penyelundupan untuk membiayai anggaran militer yang tidak mencukupi. Akibatnya, komandan militer mencari tambahan dana melalui kegiatan penyelundupan kopra, karet, kopi, dan komoditas lainnya.¹⁰

Mereka mencari sumber dana dengan cara mengekspor sendiri hasil produksi pertanian tanpa melalui prosedur atau persetujuan pemerintah pusat. Kegiatan penyelundupan dan perdagangan barter ini dikendalikan oleh OPI TT VII Wirabuana, sebagai organisasi tata niaga ekspor kopra yang dikuasai militer¹¹. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya kegiatan menyelundupan dan sistem barter kopra. Ekspor kopra yang sebelumnya memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah, berubah menjadi masalah politik akibat perbuatan monopoli tata niaga kopra.

Akibat dari situasi yang tidak bisa lagi dikendalikan, para produsen kopra

¹⁰ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Propinsi, Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi (1946-1960), *surat masuk/keluar tahun 1956-1957. Tentang yang berhubungan dengan penyelundupan kopra*. Nomor registrasi. 628.

¹¹ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Propinsi, Arsip Pribadi M Saleh Lahade . *Laporan situasi umum keamanan politik , pemerintahan sosial ekonomi di Wilayah Territorium VII/ Wirabuana Indonesia Timur tahun 1952*. Nomor Registrasi 97

daerah mengadakan konferensi kopra di Makassar pada tanggal 19 desember 1955.¹² mengenai pelaksanaan ekspor kopra dipindahkan ke Makassar dan bukan lagi di Jakarta. Kemudian pada tanggal 25 Mei 1956, diadakan konferensi Tugu Bogor ,mengusulkan mengenai penyelesaian masalah Yayasan Kopra dan mengganti Yayasan Kopra menjadi Koperasi Kopra¹³. Dan kemudian dibentuk Propinsi Sulawesi Utara pada tanggal 20 juni 1957¹⁴. Pemebentukan propinsi sulawesi utara diharapkan dapat membantu memecahkan masalah kopra yang diakibatkan oleh pemusatan kontrol pemerintah pusat atas seluruh Sulawesi.

1.2. Batasan Masalah

Penulisan sejarah bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang suatu kajian sejarah kepada masyarakat , berdasarkan waktu dan peristiwa yang dituliskan dalam serangkaian tulisan ilmiah sehingga dapat diterima dan mudah dipahami. Dalam penulisan kajian sejarah memiliki batasan tahap penelitian yang biasa disebut batasan masalah. Batasan masalah terbagi atas dua macam, yakni batasan temporal dan batasan spasial.

a. Batasan Temporal

¹² Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Arip Pribadi, Arsip Pribadi M Saleh Lahade, *Berkas mengenai kegiatan perdagangan kelapa/kopra di Daerah Territerium Indonesia Timur antara lain : Kegiatan Yayasan Kopra Tahun 1950*, Nomor Registrasi 272.

¹³ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Propinsi, Arsip Pribadi Rahman Tamma ,*Laporan pengumuman jawatan koperasi dan yayasan kopra tentang tata niaga kopra tahun 1956*.

¹⁴ *Ibid*,

Batasan temporal adalah batasan waktu penelitian. Batasan temporal sangat penting dalam penulisan sejarah agar penelitian yang dilakukan lebih difokuskan pada tahun yang menjadi objek utama dalam penelitian. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka penulis memilih batasan tahun yakni tahun 1940 sampai tahun 1957 dalam periode ini sangatlah penting memahami sejarah di mana yang diuraikan bahwa dalam tahun-tahun pertama pasca kemerdekaan, sejumlah masalah ditemukan dalam pengelolaan kopra. bagaimana kemerosotan ekonomi terjadi, juga masalah bagaimana cara membangkitkan gairah petani dalam mengelolah kopra, kemudian masalah teknik pengumpulan kopra oleh para pedagang perantara. Bagaimana Coprafonds dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda sampai masalah ekonomi yang naik turun akibat tidak jelasnya tata niaga kopra. Para petani yang mengalami kesulitan dan ekonomi yang menurun ketika diatur oleh pihak Coprafonds. Sampai daerah-daerah produsen kopra yang melakukan unjuk rasa kepada Yayasan Kopra atas permasalahan tata niaga kopra yang tidak selesai. Masuknya militer pada tahun 1950-an ke dalam bisnis pengelolaan kopra dan melakukan penyelundupan dan sistem barter tanpa diketahui dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Di tahun 1955 sampai tahun 1957, para produsen kopra mengadakan konferensi untuk penyelesaian masalah kopra.

b. Batasan Spasial

Batasan spasial merupakan batasan tempat atau wilayah yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan judul yang diajukan oleh penulis, maka batasan spasial dipenelitian ini yakni masalah Coprafonds Dan Yayasan Kopra yang dimana merupakan sejarah ekonomi politik di Makassar. Makassar dipilih karena merupakan wilayah utamadalam dengan kegiatan tata niaga kopr.

1.3. Rumusan Masalah

Yang akan menjadi aspek utama dalam penulisan ini, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana coprafonds berubah dan bagaimana proses perubahan dari coprafonds ke yayasan kopra. ?
2. Setelah dinasionalisasi ke yayasan kopra apa yang terjadi dan kemudian apa dampaknya ?

1.4 Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana coprafonds membawa perubahan kepada masyarakat pengekspor kopra yang pada saat itu yang mejandi ajang petikaian dari Coprafonds Ke Yayasan Copra.
2. Untuk mengetahui apa yang terjadi dan apa dampak Coprafonds setelah

dinasionalisasikan.

1.5 Manfaat penelitian

Setiap penulis akan mengharapkan adanya anfaatdari tulisan hasil penelitiannya, baik itu manfaat untuk dirinya maupun manfaat kepada pembacanya.

1. Memberikan informasi mengenai kegiatan Coprafonds dan situasi ekonomi para petani kelapa dan produsen kopra pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
2. Memberikan informasi mengenai kegiatan Yayasan Kopra, politik dan penyelundupan .
3. Untuk memperkaya pengetahuan sejarah mengenai kopra khususnya di Indonesia timur Dan dapat dijadikan sumber-sumber guna untuk melanjutkan penelitian sejarah selanjutnya

1.6 Metode Penelitian

Dalam metode ini penulis menggunakan metode sejarah. Metode sejarah merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam memeperoleh bukti sejarah dengan mengumpulkan sumber data agar menghasilkan urutan data yang objektif sesuai dengan peristiwa yang benar-benar terjadisehingga tulisan yang dihasilkan dapat dipercaya.

Menurut kuntowijoyo dalam bukunya yang berjudul “pengantar ilmu sejarah” terdapat tahapan-yahapan dalam penelitian sejarah , yaitu pemilihan topik

pengumpulan sumber, verifikasi(kritik sumber), interpretasi, dan penulisan¹⁵.

1. Pengumpulan sumber

Pengumpulansumber atau heuristik , sumber yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis penelitian sejarah yang akan diteliti atau dikaji. Dalam proses pengupulan sumber penulis melakukan penelitian ke kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Disinin penulis mencari dan mengumpulkan sumber premier dalam bentuk berupa arsip yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian penulis juga menggunkan buku-buku karangan ilmiah sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis. Koleksi buku-buku penulis di dapatkan dari perpustakaan Universitas Haanuddin, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan beberapa artikel dan jurnal ilmiah yang penulis dapatkan.

2. Verifikasi sumber.

Pada tahap verifikasi akan dilakukan krtik terhadap data-data yang akan dijadikan sebagai sumber dalam penelitian. Krtiki ini berupa autentisitas atau keaslin sumber dan kredibilitas atau keabsahan sumber.

Pada tahap ini penuis melihat apakah data didapatkan benar dikeluarkan oleh pemerintah pada masa itu. Dari segi autensitas

¹⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2013),Hlm.67

penulis melihat bahwa dokumen tersebut asli dengan kualitas kertas yang sudah menguning dan hamper rapuh, kata-kata yang digunakan setiap kalimat belum menggunakan Ejaan yang disempurnakan(EYD) serta pada dokumen tersebut jelas terdapat tandatangan dan surat/masuk yang berhubungan dengan Yayasan kopra.

Dari segi kredibilitas atau keabsahan sumber penulis melihat bahwatahun 1940-1957 adalah masa-masa dimana terjadi ketegangan oleh pemerintah pusat dan daerah mengenai kopra, dapat dilihat dari aturan yang diterapkan, isi sura-surat mengenai keputusan dan aturan yang di buat oleh pemerintah pusat.

3. Interpretasi Data

Interpretasi atau penafsiran merupakan proses dimana seorang meneliti menafsirkan data yang diperoleh dengan tetap mencantumkan data dan keterangan darimana data itu diperoleh. Interpretasi data ini lebih focus pada bagaimana seorang meneliti menafsirkan data yang telah didapat atau data tersebut akan digunakan pada bagian mana dalam penulisan hasil penelitiannya. Interpretasi terdiri dua macam yaitu analisis dansintetis.

Analisis yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dengan melihat fakta-fakta yang ada. Dalam penelitian ini fakta data yang didapatkan berupa adanya konflik yang pada tanamanan kelapa yang sudah dikelola menjadi kopra, sampai pada mengapa pembentukan

Coprafonds hingga ke Yayasan Kopra.

Setelah menganalisis data-data tersebut kemudian dilakukan sintesis atau menyatukan data berdasarkan fakta yang diperoleh dan ditarik atau menyatukan data berdasarkan fakta yang diperoleh dan ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kopra tidak hanya bisa dikelola oleh masyarakat produsen kopra, tetapi dapat sampai pembentukan Coprafonds sampai ke Yayasan kopra.

4. Historiografi atau Penulis

Historiografi tau penulisan adalah thap akhir dalam suatu penelitian . dalam penulisan sejarh, aspek kronologi sangat-sangat penting , sehingga urutan waktu dan perubahanyng terjadi dapat diukur. Penulisan dilakukan stelah semua data yang diperoleh telahdiketahui keabsahaanya yang kemudian dituangkan dalam suatu tulisan ejarah.

1.7 Tinjauan Pustaka

Penulisan sejarah kopra dan perkembangannya di kota Makassar yang di tulis oleh prof. Dr. Abd Rayid Asba Ma, pada tahun 2007 mengenai “kopra Makassar perebutan pusat dan daerah”. dalam pembahasannya menjelaskan tentang wilayah produksi kopra, jaringan pengangkutan, dan eksportir dan kebijakan politik perkopraan. wilayah produksi kopra dari wilayah Sulawesi Selatan dan luar Sulawesi Selatan. ,jaringan pengangkutan kopra Makassar, khususnya pelabuhan-

pelabuhan yang menyangga Makassar sebagai pusat ekspor kopra. Dan sejarah perkembangan ekspor kopra yang menjadi kekuatan ekonomi dunia dan muncul sebagai pusat perdagangan kopra di Hindia Belanda sampai ekspor kopra diatur secara langsung oleh pemerintah kolonial yang ditandai dengan dibentuknya Coprafonds pada tahun 1940. Kemudian dinasionalisasi menjadi Yayasan Kopra pada tahun 1954.

Buku Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX Studi Tentang Kebijakan Maritime*(Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI dan Forbfoundation, 2002). Membahas mengenai kebijakan maritime yang dimana ini juga mempunyai hubungan dengan tata niaga kopra dan jaringan-jaringan perdagangan kopra Makassar.

Buku prof. Dr. Abd Rayid Asba Ma, *Produksi Dan Kebijakan Ekspor Kopra Makassar 1927-1958*, (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Indonesia , 1997) membahas mengenai produksi kebijakan ekspor kopra di Makassar baik pada masa kolonial Hindia Belanda maupun pasca kemerdekaan yang membentuk ekonomi nasional Negara Indonesia. Yang diharapkan dapat membantu Makassar sebagai satu-satunya pengeksport Kopra untuk Wilayah Timur besar. Dalam buku ini banyak menjelaskan mengenai transformasi perekonomian Makassar.

Buku Sartono Kartodirjo *Sejarah Perkebunan Di Indonesia : Kajian Sosial Ekonomi* (Jakarta : Aditya media 1991) . menjelaskan masalah perkebunan-perkebunan Makasar yang dikelola oleh petani, salah satunya perkebunan kelapa yang dikelola menjadi dan menjadi kekuatan ekonomi dunia.

Makassar sebagai pusat Perdagangan yang menjadi bagian dari kekuatan ekonomi dunia, juga dijelaskan dalam tulisan Prof. Dr. Abd. Rasyid Asba MA, Kontribusi Makassar terhadap perluasan perdagangan kopra . mengenai jalur-jalur perdagan kopra Dan struktur perdagangan kopra di Makassar dan kebijakan penanaman kelapa di Nusantara perkembangan perkelapaan di Sulawesi Selatan , perkembangan perkelapaan di Sulawesi Utara , perkembangan perkelapaan di Maluku , perkembangan perkelapaan di Sumatra Barat, dan perkembangan perkelapaan di Kalimantan Barat. Dan wilayah-wilayah produksi kelapa di Indonesia timur .

Jurnal dari tulisan Prof Dr Abd.. Rasyid Asba MA, “integrasi ekspor kopra Makassar di antara kontinuitas dan diskontinuitas: makara, sosial humaniora, vol. 10 desember 2016. Dalam tulisannya banyak membahas mengenai perdagangan kopra masyarakat Makassar khususnya dalam terbentuknya politik kolonial Belanda di Indonesia bagian timur dimana kopra sebagai barang dagangan utama dari pelabuhan makassr, dan terintegrasinya pulau-pulau dibagian timur, baik hubungannya dengan Makassar maupun pasar dunia. ekspor kopra. Kemudian journal dari tulisan Hasanuddin Anwar” dinamika tataniaga kopra di Mnahasa (1946-1938)”:Patanjala vol. 10, juni 2018, walaupun dalam tulisannya lebih membahas mengenai Minahasa salah satu daerah yang mengalami diskriminasi dalam mengatur tata niaga kopra. tetapi juga memiliki hubungan mengenai daerah-daerah produsen yang mengalami masalah ekspor kopra dan ketidakadilan dalam pemindahan Coprafonds ke Yayasan

kopra. Kemudian artikel Anonim, kontraksi : monopoli coprafonds dalam ekspor kopra makassar 1940-1954. Membahas mengenai monopoli kopra. Journal Abu Muslim "Jejak Naskah Kuno Di Negeri Kopra" Balai Litbang Agama vol. 2 No. 1 2014, sedikit menjelaskan mengenai jejak-jejak naskah kopra dan perjalanan khazanah di Nusantara.

Dalam melakukan penelitian, penulis menyelusuri dokumrn-dokumen arsip yang tersimpan di Arsip Daerah Propinsi Sulawesi Selatan . Arsip Pribadi Rahman Tamma, Laporan pengumuman jawatan koperasi dan Yayasan Kopra tentang tata niaga kopra, tahun 1956.

Arsip pribadi M. Saleh Lahade, yang terdiri dari Arsip Pribadi M. Saleh Lahade, Ikhtisar Konperensi Kopra Tugu Bogor 25 Mei 1956 reg. NO 325. Arsip Pribadi M. Saleh Lahade, Laporan Triwulan Perkembangan Ekspor Kopra Seksi- 5 Territorium VII Angkatan Darat tahun 1953 reg. No 94. Dos.5. Arsip M. Saleh Lahade peraturan tentang tata niaga 10 juni 1955 reg. No. 325 , Arsip Propinsi Sulawesi , Ekspor Yayasan Kora tahun 1954, Arsip M. Saleh Lahade mengenai masalah ekonomi dan perdagngan (kegiatan perdagangan kopra /kelapa daerah teriterium VIII Indonesia Timur, antara lain kegiata Yayasan Kopra Sulawesi. No reg 272. Arsip M Saleh Lahade, lapran situasi umum keamanan, poltik , pemerintahan sosial ekonomi di wilayah teriterium VII/wirabuana indonesia timur tahun 1952. Reg. No. 97. Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi 1946-1960, yang terdiri dari, Gubernur Sulawesi : surat masuk/ keluar tahun 1953-1957 tentang masalah yang

berhubungan dengan Yayasan Kopra, Reg 627. Gubernur Sulawesi surat masuk keluar tahun 1956-1957 tentang yang berhubungan dengan pengangkutan penyelundupan kopra , Reg 628. Ketua DPRD Minahasa: laporan tanggal 5 desember 1956 tentang sidang perubahan masalah kopra di Minahasa (Propinsi Sulawesi), Reg 629.

Arsip propinsi Sulawesi , ekspor kopra tahun 1954. Catatan pidato M Saleh Lahade tentang piagam perjuangan permesta, pedoman tentang kerja staf khusu O.P.I.X. TT.VII. Laporan pertanggung jawaban OPI.X Usaha-usaha perkembangan perdagangan pada tanggal 1 Oktober 1955.

Arsip-arsip di atas memuat catatan-catatan laporan perdagangan kopra, laporan ekonomi sosial dan politik, serta laporan dan perkembangan kopra. Terutama pada Arsip M Saleh Lahade mengenai masalah ekonomi dan perdagngan (kegiatan perdagangan kopra /kelapa daerah teriterium VIII Indonesia Timur, antara lain kegiata Yayasan Kopra Sulawesi. No reg 272. Arsip yang secara khusus yang memuat laporan tentang kegiatan Yayasan Kopra, pasal-pasal mengenai kepengurusan Yayasan kopra dan menteri- menteri yag bertugas.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pengaturan penulisan agar tulisan yng dihasilkan tersusun dengan alur penulisan. Dalam penelitian terdiri atas lima bab. **Bab pertama**, menjelaskan latar belakang secara umum yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian baik pengalaman sewaktu dalam penelitian maupun

pada waktu mencari data tentang mengenai Coprafonds. Dalam bab pertama terdiri dari komposisi masing-masing latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Karya-karya terdahulu, metode penelitian dan terakhir istematika dalam penulisan.

Bab kedua, penulisan akan membahas mengenai sejarah bagaimana awal mula perkembangan kopra sebelum di bentuk Coprafonds oleh pemerintah Hindia Belanda.

Bab ketiga , penulis akan membahas mengenai bagaimana sejarah awal pembentukan Coprafonds, situasi yang terjadi karna pembentukan dari Coprafonds dan perubahan kepada masyarakat petani dan produsen kopra sampai pada dinasinalisasi ke Yayasan Kopra

Bab keempat adalah inti dari penulisan ini, penulis akan membahas bagaimana Coprafonds dinasionalisasi ke yayasan kopra, situasi keuangan anggaran dan dampak nasionalisasi kepdamasyarakat petani dan produsen kopra sampai dengan penyelesaiannya.

Bab kelima adalah brisi tentang kesimpulan dari semua yang dihasilkan dalam penelitian ini.

BAB II

PERKEMBANGAN KOPRA SEBELUM COPRAFONDS DIBENTUK

2.1 Kopra

Kopra merupakan komoditi dagang utama yang berasal dari daerah Indonesia Timur khususnya Makassar, kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting, karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Sulawesi bagian selatan menjadi pasar yang besar bagi kopra di Hindia Belanda. ekspor kopra di Makassar. Ketika Makassar menjadikan kopra sebagai komoditas dagang utama, Makassar senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang dinamis.. Orang Cina di Selayar memberikan pinjaman modal kredit kepada para pedagang Bugis-Makassar untuk memperoleh kopra.¹⁶ Terbentuknya ekonomi perkopraan melalui pedagang pribumi dan Cina membawa perubahan kepada besar dalam menentukan ekonomi kepulauan, kopra mulai menjadi komoditas penting dalam perdagangan. Pedagang cina yang semula hanya menjalin hubungan dagang pribumi secara perlahan menanamkan modalnya dalam pengembangan usaha perkopraan,.

2.1.1 Perkembangan kelapa di Sulawesi Selatan

Tanaman kelapa pertama kali diperkenalkan pada tahun 1848 oleh

¹⁶ Nahdia Nur, Bambang Purwanto, Djoko Suryo, "Perdagangan dan ekonomi Sulawesi Selatan, pada tahun 1900-an sampai dengan 1930-an," *Jurnal Ilmu Budaya*, vol.4 No. 1(juni 2016) hlm 620.

pemerintah kolonial Belanda¹⁷. Seseorang dari Belanda yang mengunjungi daerah Makassar mengungkapkan keindahan Makassar dan pedalaman Makassar dengan jejeran tanaman kelapanya. Kemudian awal abad ke- 20 tanaman kelapa telah dikelola khusus sebagai tanaman perusahaan, khususnya penduduk Indonesia bagian Timur, di Sulawesi Selatan kopra telah menjadi komoditi dagang yang utama, ketika Eropa menggunakan kopra sebagai bahan dasar yang penting. Perkembangan kopra bukan saja dari Sulawesi Selatan, tetapi juga dari luar wilayah Sulawesi Selatan, seperti Sulawesi Utara, Maluku, Sumatra Barat, dan Kalimantan Barat.¹⁸

Kelapa merupakan tanaman yang mempunyai begitu banyak manfaat bagi kepentingan manusia. Tanaman kelapa yang ini di juluki tanaman kehidupan, tanaman yang menyenangkan, dan pohon yang tak terbatas kegunaannya. Banyak manfaat yang didapatkan masyarakat jika dikelola dengan baik dan benar. Tanaman kelapa tidak hanya bermanfaat untuk manusia di daerah tropis tempat kelapatumuh, tetapi juga bermanfaat kepada mereka yang berada di belahan dunia. Untuk penduduk Sulawesi Selatan, kopra telah menjadi tanaman yang peting ketika Cina menjadikannya sebagai komoditas dagang ke Singapura. Hanya pada saat itu petani terkendala transportasi yang tidak memadai.. Di sinilah para petani memulai produksi kelapa untuk di jadikan kopra. Bagi petani, menghasilkan kopra sangat

¹⁷ Netti Suriana, *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit*, (Bhuana Ilmu Popular, 2019)

¹⁸ A. Rasyid Asba :”*kopra mkassar perebutan pusat dan daerah :kajian sejarah ekonomi politik regional di Indonesia* : (Jakarta;Yayasan OborIndonesia, 2007) ,hlm 190.

mudah. Kopra kering bukan mendatangkan lebih banyak uang, namun juga lebih mudah diperoleh karena pembuatannya sederhana dan tidak menuntut banyak keahlian. Luas areal tanaman kelapa di Indonesia Timur adalah sekitar 500.000 hektar yang setiap tahunnya memproduksi 500.000 ton.¹⁹

2.1.1. Pembuatan Kopra

Kopra merupakan salah satu produk dari daging buah kelapa yang dihasilkan melalui proses pengeringan dengan cara dijemur atau dikeringkan, yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dimana dapat diproses kembali untuk menghasilkan minyak goreng yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dibandingkan minyak goreng kelapa sawit. Kopra merupakan komoditi ekspor bagi Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil utama kelapa, sebagai bahan baku pembuatan kopra. Wilayah Indonesia Timur cocok untuk pertanian kelapa karena kondisi cuaca, dan tanahnya banyak mengandung batuan kapur, serat alluvium (lempung pasir halus) yang banyak mengandung *texture* (susunan kimiawi) tanah yang subur.²⁰ Di ketahui bahwa wilayah Indonesia Timur sebagai pusat penghasil kopra, bukan saja dari Sulawesi Selatan, tetapi juga wilayah dari luar Sulawesi Selatan. Pohon kelapa tumbuh di hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan, seperti Selayar, Bantaeng, Bulukumba, Luwu Dan Mandar. Sudah terlihat bahwa daerah Makassar sebagai tanah yang subur, Makassar adalah daerah persawahan yang indah, tanaman kelapa

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 34

²⁰ Tim Penulis PS, *Agribisnis Tanaman Perkebunan*,(Jakarta :Penebar Swadaya, 2008), hlm 10

di atur secara teratur disetiap pematang sawah. Itulah mengapa kelapa lebih banyak tumbuh di daerah Sulawesi Selatan.

Budidaya kelapa di Indonesia Timur pada umumnya di usahakan oleh kelompok-kelompok petani kecil, Mereka memiliki kesempatan dari lembaga tradisional untuk memberikan jaminan kebutuhan yang sama sekali berkaitan dengan kemampuan mereka dalam bercocok tanam kelapa²¹. Kesempatan itu terbuka setelah tau bahwa produksi kopra kelapa dari tanah garapan mereka, menjadi sangat berharga setelah datangnya pedagang perantara yang akan menampungnya untuk dijadikan kopra.

Untuk menghasilkan kopra, sabut kelapa terlebih dahulu di buang, Daging kelapa yang telah dipisahkan dengan tempurungnya kemudian di keringkan. Pengeringan daging kelapa biasanya dilakukan oleh wanita. Selain dikerjakan petani kecil (perorangan), kopra juga dikerjakan secara rombongan. Pekerja borongan biasanya melayani petani yang mempunyai kebun kelapa yang luas. Selain itu, ada juga kelompok pengumpul kelapa dan pengolah kopra secara rutin. Kelompok-kelompok tersebut pada umumnya tidak memiliki pohon kelapa. Mereka membantu para petani mengelola kelapa menjadi kopra atau bertindak sebagai pedagang perantara. Namun kopra yang mereka buat tidak selalu baik / berkualitas, itu karena

²¹ John Rivel Purba, Wilman D. Lumangino, "Budidaya kelapa dan pemasaran kopra di Buol 1970-2019," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* vol. 5, No 1, (Desember 2021), hlm,35

kopra yang di hasilkan sering lembab karena tidak terlalu kering²².

Untuk memperoleh kopra dengan kualitas baik, maka daging kelapa harus di buat sekering mungkin. untuk menghilangkan jenis jamur aspergelus yang cepat tumbuh pada daging kelapa. Jamur itu akan membuat kualitas kopra berkurang. Itulah sebabnya sehingga bahan baku kopra harus dipilih dari kelapa yang sudah tua. Kelapa yang masih muda, dengan daging kelapa yang lembek dan tipis, tidak akan bertahan lama. Cara pengeringan daging kelapa menjadi kopra ada dua, yaitu pengeringan dengan sinar matahari (kopra matahari) dan pengeringan dengan asap. Pengeringan dengan sinar matahari minimal berlangsung lima hari. Sementara pengeringan dengan asap biasanya hanya dua hari. Salah satu kendala dalam pengeringan dan penjemuran adalah musim hujan Karena jika tidak kering dengan baik ini dapat menghasilkan kopra berwarna cokelat atau kelabu yang otomatis akan meurunkan harga jualnya. Karena pada saat itu pengelolaan di bawah orang pengusaha Eropa maka orang-orang Eropa kemudian berhasil mengembangkan alat pengeringan kopra asap yang kualitasnnya mengimbangi kopra yang dikeringkan dengan sinar matahari. Alat itu menggunakan besi baja dan arang yang di ambil dari tempurung kelapa. Tetapi adanya ini penduduk menganggap bahwa pengelolaan ini memakan banyak biaya dan membutuhkan banyak tenaga kerja yang banyak. Warga pribumi lebih memilih mengguakan belahan bumbu tradisional dengan buah dan tempurung kelapa basah sebagai bahan bakar dan tidak perlu banyak diawasi

²² *Ibid.*, hlm. 36

sampaikering.

Selain itu penduduk memanfaatkan tanah-tanah tegalan yang subur dan memenuhi syarat untuk dibuka menjadi lahan baru buat penanaman kelapa. Penduduk membuka lahan dengan cara terlebih dahulu menaburinya dengan alang- alang. Setelah kering, kemudian dibakar, ini dipercaya bahwa pembakaran seperti ini akan menyuburkan tanah. Produktivitas pohon kelapa pada hakikatnya ditentukan oleh bibitnya. bibit ini didapatkan dari penduduk Sulawesi Selatan dari tanaman kelapa di sekitar rumah atau kebun kelapa mereka, yaitu dengan cara memusnahkan kecambah buah kelapa di atas bedengan-bedengan tanah lembab, agar akar dan tunas kelapa itu cepat tumbuh ini memakan waktu selama enam bulan. untuk tetap menjaga kelembapannya tempat pembibitanm harus disiram tiap pagi dan sore. Ada juga yang membibit kelapanya dengan mengupas sabutnya tetapi cara ini kurang efektif karena membuat kelapa mudah pecah dan membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu tunasnya tumbuh.

Setelah proses produktivitas kelapa menjadi kopra adalah pengangkutan, yaitu dikirim ke gudang-gudang penampungan letaknya di kota-kota kecamatan atau tempat-tempat yang dekat dengan pantai seperti, mandar, pesisir teluk bone dan daerah-daerah seperti minahasa dan maluku²³. Pengangkutan merupakan hal yang paling mendasar dalam proses perdagangan kopra dan terbentuknya pola perdagangan, Pengangkutan adalah komponen yang paling utama dalam

²³ *Ibid.*, hlm. 131

mengintegrasikan pulau-pulau di wilayah timur.

2.2 Jaringan Perdagangan Kopra Makassar

Sejak tahun 1600, Masyarakat orang Bugis sudah melakukan pelayaran niaga ke berbagai pusat-pusat niaga di Asia Tenggara. mereka telah berlayar memanfaatkan angin musim Dan membetuk pemukiman-pemukiman di sepanjang pantai berdagang dan mengorganisir penangkapan teripang. Perahu-perahu mereka banyak dijumpai Jolo(Solo) ,Banjarmasin, Palembang, Samarinda, Kutai, Pasisir, Johor, Ayuthia, Pahang, Aceh, Maluku, Ternate ,Banda, Pesisir Timur Iriann Jaya, dan pantai Utara Australia²⁴.

Pada abad ke 15 terdapat lima jalur perdagangan Petama adalah jaringan perdagangan teluk Bengal yang meliputi pesisir koromendal di india selatan, seilo, birma, dan pesisir utara dan barat Sumatra. Kedua jaringan perdagangan Selat Malaka. Ketiga jaringan perdagangan yang meliputi Semenanjung Malaka, Thailand, Vietnam Selatan, keempat jaringan perdagangan Laut Sulu, Meliputi Pesisir Barat Luzon, Mindoro,Cebu, Maindanoo, Peisisr Utara Kalimantan. Kelima jaringa Laut Jawa yang meliputi Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara,Pesisir Barat Luzon, Mindoro,Cebu, Maindanoo, Peisisr Utara Kalimantan. Kelima jaringa Laut Jawa yang meliputi Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, Pesisir Barat Kalimantan Jawa, Dan

²⁴ A Rasyid Asba, *op.cit.*, hlm. 132

bagian Selatan, Sumatra Sedangkan pelabuhan²⁵. Sedangkan Pelabuhan- pelabuhan di pulau Sulawesi dalam jaringan perdagangan pelayaran niaga berada di bawah pengawasan kelompok pedagang di Jawa.

Wilayah Sulawesi tidak disebutkan dalam kelima jaringan perdagangan karena dalam urainya tentang jaringan pelayaran niaga. Hal memasukkan pelabuhan-pelabuhan di jazirah Selatan Sulawesi ke dalam jaringan pelayaran niaga yang sebagian besar berada di bawah pengawasan pedagang di Jawa. Mereka berlayar ke Timur melalui pelabuhan-pelabuhan di Nusa Tenggara hingga Maluku, kemudian menyusuri pelabuhan di jazirah Selatan Sulawesi terus ke Utara menyusuri pesisir timur Kalimantan Hingga Mindanao. Pelayaran ke barat melalui pesisir Timur Sumatr, memasuki jaringan perdagangan Selat Malaka dan pelabuhan-pelabuhan di Sumatera Utara.

Penduduk Sulawesi Selatan pada abad ke-19 banyak melakukan pelayaran niaga ke berbagai pusat perdaganagan dan daerah produksi, karena sebagiandari mereka, terutama yang berasal dari kerajaan sekutu²⁶, tidak pernah mengunjungi Bandar niaga yang berada di bawah pengawasan pemerintah Hinda- Belanda. Sabagaimana yang di ungkapkan dalam pertemuan di sendereng pada 1824 merikasulit mendapatkan izin berlayar dari pemerintah. Karena itu mereka memilih

²⁵ Edward .L Poelinggomang , *Makassar abad XIX studi tentang kebikan maritime*, (Jakarta :yayasan adikarya IKAPI dan Forbfoundation, 2002), hlm. 128.

²⁶ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Arsip pribadi M Saleh Lahade, *peraturan pemerintah tentang tata niaga 10 juni 1955*, Nomor Registrasi 325.

berniaga ke Bandar niaga lain seperti joilolo(sulu) ,Banjarmasin, Palembang, johor, Pahang , dan Aceh.²⁷

Pada awal tahun 1900 kopra sudah menjadi komoditi utama dalam perdagangan. Kopra sudah mulai banyak diperdagangkan antar pulau dari Maluku, Merauke , Ternate, Gorontalo , Menado, dan Selayar²⁸. Komoditi ini banyak dibawa ke Makassar dan selanjutnya di ekspor ke Singapura. Namun ekspor kopra ke Singapura pada abad ke-20 terbatas, kopra lebih banyak di arahkan untuk Eropa, disebabkan karena pemerintah Belanda mulai mengurangi monopoli pedagang Cina atas kopra Makassar.

Pemerintah Belanda mulai memberikan hak monopoli KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*,) dalam pengangkutan kopra. Ada tiga prinsip yang dijalankan KPM untuk memonopoli pelayaran. Pertama, mereka memperhitungkan pelayaran rutin semua pengangkutan, bukan hanya pada jalur bebas, tetapi juga jalur tambahan. Kedua, Wilayah Indonesia Timur yang terdiri dari berbagai pulau harus dikembangkan. Ketiga, KPM harus membangun hubungan yang lebih luas dan arah yang baik. Dengan adanya KPM sebagai sarana utama bagi perkembangan

²⁷ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Arsip Pribadi Rahma Tamma, *laporan pengumuman jawatan koperasi dan yayasan kopra tentang tata niaga kopra tahun 1956*.

²⁸ A.rasyid asba, *op cit.* ,hlm. 80

kekuasaan.²⁹

Setelah konferensi pengangkutan Batavia atau “Batavia Vracht Conferentie” (BVC) pada tahun 1900, kapal-kapal besar yang masuk di Makassar mulai diatur secara ketat. Kapal-kapal yang boleh mengangkut kopra adalah kapal yang telah masuk dalam organisasi BVC. Kapal kapal yang tidak mendapat izin dari Batavia Vracht Conferentie tidak diperkenankan beroperasi di wilayah Hindia Belanda, khususnya dalam perdagangan antar pulau. Dalam konferensi itu juga diputuskan undang-undang tarif pengangkutan kapal-kapal yang masuk di Hindia Belanda, termasuk pengaturan *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) sebagai organisasi perusahaan perkapalan Belanda yang diberikan kebijakan khusus untuk memonopoli pengangkutan di Hindia Belanda.

Kebijakan ekspor kopra diputuskan bahwa kopra dari Makassar diekspor secara langsung ke Eropa, tanpa melalui Singapura atau Batavia, dengan alasan bahwa tarif pengangkutan lebih rendah, bila dibandingkan dengan sistem pengangkutan yang tidak langsung. Itulah sebabnya perusahaan kapal uap seperti Noorsche Lloyd dan Celebes Lloyd yang berpusat di Eropa secara langsung dan teratur mengangkut kopra dari Makassar³⁰. Akibatnya adalah hubungan dagang Singapura dengan wilayah-wilayah Timur Besar entitasnya menurun karena pedagang-pedagang Cina Makassar lebih diarahkan mengespor kopra secara

²⁹ Bambang Surowo, “Kpm Versus Peln : Persaingan merebut hegemoni jaringan pelayaran di nusantara, 1945-1960,” *jurnal sejarah citra lekha*, vol. 1, no 1, 2016, hlm. 15

³⁰ A. Rasyid Asba., *op, cit.*, hlm. 175.

langsung ke Eropa.

2.3 Kopra Makassar di Masa Kejayaan

Sejak tahun 1880 hingga tahun 1930 kopra sudah menjadi komoditi dagang yang utama khususnya Sulawesi Selatan di mana kopra menjadi sangat populer karena manfaat dan gemaannya. Perdagangan Kopra kemudian menjadi meluas dan menjadi kekuatan ekonomi regional yang mengalami masa-masa fluktuatif menjadi booming, karena ekspansi penjualan harga dan masa ketika kopra mengalami kontraksi hingga tahun 1958 sebelum pada akhirnya menurun³¹. Dalam waktu yang panjang itu, kopra telah saling mempengaruhi dinamika ekonomi dan sosial politik baik lokal, regional hingga internasional.

Pembangunan pabrik minyak Hindia Belanda, Oliefabrieken Insulinde (OFI) di Makassar tahun 1913 adalah indikasi nyata berlangsungnya situasi saling ketergantungan itu. Pasukan kopra bagi perusahaan OFI dari daerah-daerah penyangga di Sulawesi. Belanda ingin memastikan monopoli produksi minyak kelapa dari Makassar itu menciptakan ketergantungan bagi Singapura, Eropa, dan Amerika. Selain itu, di Indonesia Timur, Khususnya Makassar ketika bangsa-bangsa Eropa mencari bahan baku untuk membuat mentega dan sabun, ini menjadi penting bagi Makassar dalam tata niaga kopra, baik antar pulau maupun di pasar dunia. Terintegrasinya Makassar dalam perdagangan kopra antar pulau Indonesia Timur,

³¹ A. Rasyid Asba, "integritas ekspor kopra Makassar diantara kontinuitas dan diskontinuitas," *Makara, Sosial Humaniora*, vol,10, No 2, desember 2006, hlm. 63.

mendorong Makassar sebagai kekuatan ekonomi Hindia Belanda dan mampu menahan laju perkembangan ekonomi Singapura, yang sejak abad ke-19 mengancam kedudukan Makassar sebagai pusat perdagangan Indonesia Timur. ketika Makassar menjadikan kopra sebagai komoditas dagang utama, yakni terbentuknya ekonomi perkopraan melalui pedagang Pribumi dan Cina, ini membawa perubahan besar dalam pembentukan ekonomi kepulauan.

Pedagang Cina yang hanya semula menjalin hubungan dagang dengan pribumi, perlahan menanamkan modalnya dalam pengembangan usaha perkopraan, dan petani yang semula menanam kelapa untuk kebutuhan lokal, berubah menjadi kebutuhan ekonomi niaga di pasar dunia. Pedagang pribumi dan cina yang sebelumnya menemptkan singapura sebagai pusat perdagangan kopra, beralih menjadi system perdagangan langsung antara Makassar dengan eropa. Ada dua alasan mengapa Eropa dapat meguasai perdaganagn kopra pertama, pemberian monopoli pengangkutan kopra kepada armada KPM untuk mengintegrasikan perdagangan antar pulau.

Pada tahun 1915 konsumen utama kopra adalah perancis. Negara ini mengimpor separuh produk kopra dunia dan Sebagian besar masyarakat perancis mengkonsumsi kopra untuk kebutuhan industri rumah tangga. Konsumen kopra terbesar kedua adalah Jerman. Sementara Belanda menjadi peringkat ketiga mengimpor kopra di tahun 1920. Selanjutnya Rusia ,Denmark dan Belgia . konsumen terbesar kedua ekspor kopra Makassar adalah Jerman. Industri yang berkembang

adalah margarin.

2.4 Kopra di Masa Depresi ekonomi

Pada tahun 1930 Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi yang sangat drastis yang mengakibatkan rendahnya nilai ekspor dari berbagai jenis ekspor. Penurunan volume produksi ekspor tidak sebanding dengan menurunnya nilai ekspor, sehingga muncul ketimpangan dari berbagai komoditi ekspor Hindia Belanda. Krisis tersebut berdampak pada menurunnya nilai ekspor Hindia Belanda munculnya kesulitan ekonomi, menurunnya hubungan perdagangan, bahkan penutupan perusahaan, dan membuat pendapatan Negara Hindia Belanda menurun, dalam perkembangan ekonomi dunia. Depresi berdampak pada menurunnya perputaran perdagangan, pemberhentian perusahaan secara besar-besaran, dan meningkatnya pengangguran.

Krisis ekonomi ini sudah mulai terjadi sejak tahun 1925 sampai tahun 1929 sehingga dapat dikatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1930 itu akibat dari kekeliruan kebijakan ekonomi pada tahun 1929 yakni ketika nilai saham di Wall Street New York merosot tajam sekitar 13 juta lembar saham jatuh di bawah harga yang sangat rendah. Jumlah ekspor pada tahun 1930 terus menurun hingga tahun 1940. Itu berarti Hindia Belanda mengalami depresi ekonomi yang berkepanjang.

Melemahnya pasaran kopra dunia pada tahun 1930 sampai tahun 1932 lebih banyak disebabkan beredarnya produksi minyak ikan paus, minyak biji kapas, serta

minyak dari kacang-kacangan. Jenis minyak tersebut sejak tahun 1929 saat menjelang krisis ekonomi, sudah banyak tersedia. Jenis minyak itu bahkan tersimpan ratusan ribu ton di Eropa dan Amerika Serikat. Minyak jenis itu baru mulai berkurang pada awal tahun 1933. Sejak tahun 1931, sejumlah besar minyak biji kapas telah dibeli oleh pabrik-pabrik penggilingan gula di Amerika Serikat. Pembelian itu berlangsung selama setahun. Memasuki tahun 1933, Amerika kekurangan lemak nabati. Kemudian pada tahun 1935, penggunaan minyak biji katun di Amerika hingga mencapai 93.770.000 pon, bahkan mencapai 145.129.000 pon pada tahun 1936.

Pada tahun 1934 harga kopra di pasaran dunia menurun dengan tajam, permintaan pasaran kopra di Eropa mulai menurun. Banyak eksportir Makassar menguluh sampai menutup usahanya, termasuk perusahaan produksi kopra Makassar milik Denmark yang merupakan eksportir terkuat sejak tahun 1920 tidak mampu melanjutkan usahanya. Merosotnya harga kopra di pasaran itu karena melimpahnya produksi minyak lemak, seperti minyak ikan paus dan minyak dari biji kapas, dan berbagai minyak dari kacang-kacangan asal Afrika. Salah satu cara yang dilakukan untuk menangani pembelian kopra adalah dengan menurungkan harga kopra dipasaran lokal dan menaikkan biaya pengangkutan. Kebijakan ini berdampak pada wilayah produsen kopra. Maka diadakan kongres partai Celebes yang dipimpin oleh Nadjamuddin daeng Mallewa, agar harga kopra lokal harus ditinjau ulang kembali untuk menambah pendapatan petani kelapa, tetapi hal ini tidak berhasil

karena harga pasaran kopra terusjatuh dipasaran dunia.

BAB III

PEMEBENTUKAN COPRAFONDS DAN PERUBAHAN KEPADA

MASYARAKAT PENGEKSPOR KOPRA

3.1. Sejarah dibentuknya Coprafonds

Coprafonds dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 13 September tahun 1940³². Pembentukan ini bertujuan untuk mengatur kembali pembelian, penggudangan dan penjualan kopra, yang terjadi penurunan besar-besaran hingga mengakibatkan terjadinya depresi ekonomi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda merasa harus membentuk tata niaga perdagangan untuk mengantisipasi jatuhnya harga kopra. Coprafonds ini berpusat di Makassar dan memiliki cabang di berbagai daerah di Indonesia seperti, Manado, Gorontalo, Maluku Selatan, Kepulauan Sunda Kecil, Papua New Gini, dan Kalimantan Barat. Maka dibentuklah salah satu cara yang digunakan Coprafonds adalah dengan menurunkan biaya pengangkutan dan membangun gudang-gudang penampungan kopra yang ada di Tahuna, Manado, Bitung, Kema, Kotabunan, Amurang, Inobonto, Kwardang, Gorontalo, Toli-Toli, Donggala, dan Poso³³. Coprafonds bekerja diseluruh Indonesia, baik perdagangan ekspor kopra maupun perdagangan antar pulau. Salah satu kebijakan Coprafonds adalah mengatur tata niaga perdagangan kopra. Coprafonds dikenal dengan dua

³²A. Rasyid Asba :”kopra Makassar perebutan pusat dan daerah :kajian sejarah ekonomi politik regional di Indonesia : (Jakarta;Yayasan OborIndonesia, 2007) ,hlm 189.

³³ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Arsip Pribadi M Saleh Lahade, *Berkas mengenai kegiatan perdagangan kopra kelapa/kelapa didaerah teritorial VII Indonesia Timur, antara lain : kegiatan Yayasan Kopra 1950*, Nomor registrasi 272.